



**KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER SEBAGAI
PRODUK POLITIK****Haris¹, Lingga Nurul Fathu²**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

e-mail: ariesaqrius@gmail.com¹ , nurulfathu1904@gmail.com²**Accepted:** 23/9/2024 ; **Published:** 24/9/2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan otoritas keuangan dalam mengelola perekonomian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dan moneter sebagai produk politik dalam menjaga stabilitas ekonomi serta pertumbuhan jangka Panjang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter sebagai produk politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan alat utama dalam pengelolaan ekonomi yang dipengaruhi oleh keputusan politik. Kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan perpajakan, serta kebijakan moneter, yang melibatkan pengaturan suku bunga dan penawaran uang, sering kali digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Politik Ekonomi.**ABSTRACT**

This research discusses fiscal and monetary policies, which are the two main instruments used by the government and financial authorities in managing a country's economy. This research aims to analyze the role of fiscal and monetary policy as political products in maintaining economic stability and long-term growth. The method used is a qualitative approach with analytical descriptive methods to analyze fiscal and monetary policies as political products. The research results show that fiscal and monetary policies are important instruments in economic management which are influenced by political dynamics. This research shows that fiscal and monetary policies are the main tools in economic management which are influenced by political decisions. Fiscal policy, which includes government spending and taxation, and monetary policy, which involves setting interest rates and the money supply, are often used to achieve economic stability.

Keywords: Fiscal Policy, Monetary Policy, Political Economy.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian . Masing - masing variabel kebijakan tersebut , kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama , yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure) . Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter , yaitu GDP , inflasi , kurs , dan suku bunga (Anwar, 2022). Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor , dimana sektor - sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga , sektor perusahaan , sektor pemerintah dan sektor dunia internasional / luar negeri . Ke empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing - masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran (Basri, 2021)

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi (Hadi, 2020). Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam . Akibatnya , gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah (Lestari, 2022). Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas , sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiskal .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter sebagai produk politik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, termasuk dokumen resmi, laporan kebijakan pemerintah, dan berbagai penelitian akademik yang relevan (Putra, 2021). Data sekunder ini akan diambil dari sumber-sumber tepercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, serta publikasi dari institusi pemerintah dan lembaga keuangan internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang mengidentifikasi berbagai kebijakan fiskal dan moneter dari perspektif ekonomi dan politik (Santoso, 2021). Penelitian ini akan fokus pada kebijakan di negara-negara berkembang untuk melihat pengaruh politik dalam proses perumusan kebijakan fiskal dan moneter. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kepentingan politik mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah.

Untuk menganalisis data, penulis akan menggunakan analisis konten, yang memungkinkan identifikasi pola-pola dalam narasi kebijakan, khususnya dalam hubungan antara kebijakan ekonomi dan politik (Wibowo S. , 2022). Analisis ini akan dilakukan dengan menelaah hubungan antara aktor-aktor politik, seperti pemerintah, parlemen, dan kelompok kepentingan, serta bagaimana mereka mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal dan moneter.

Kesimpulan penelitian ini akan didasarkan pada temuan-temuan dari analisis konten dan literatur. Penulis akan mengevaluasi peran kebijakan fiskal dan moneter sebagai instrumen politik dan bagaimana pengaruh politik dapat berdampak pada efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan ekonomi, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sistem Ekonomi Dalam Politik

Ekonomi berasal dari perkataan Yunani “Oikonomia”. Secara etimologis kata “oikos” berarti “rumah” dan kata “nomos” berarti “peraturan”. Dengan lapangannya terbatas pada soal-soal yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran jasmani (material wealth). Tetapi, karena kebutuhan manusia sedemikian

luasnya sehingga bukan hanya menyangkut jasmani saja, tetapi juga menyangkut persoalan rohani. Jadi, persoalannya menjadi lebih luas yaitu menyelidiki keinginan manusia untuk memperkecil kekurangan kemakmuran (Rahmat, 2020).

Politik dalam bahasa Arabnya disebut “Siyasyah” atau dalam bahasa Inggrisnya “Politics”. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Dalam pembicaraan sehari-hari memang politik diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “Polis” yang berarti “Negara Kota”, sehingga dapat dipahami bahwa politik memiliki hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, kemudian dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “Polis” yang berarti “Negara Kota”, sehingga dapat dipahami bahwa politik memiliki hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, kemudian dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.

Ruang lingkup dasar dari politik ialah negara, karenanya membicarakan politik sama dengan membicarakan negara. Di mana teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat (Yuliana, 2021). Ekonomi dan politik adalah dua sistem yang tidak dapat disamakan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pengertian dan fungsi, dan tujuannya masing-masing. Namun, di dalam perkembangan terbukti bahwa sistem perekonomian dan perpolitikan saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan ekonomi politik sebagai sebuah sistem keilmuan banyak bermunculan.

Pada dasarnya, ekonomi politik dijadikan Negara sebagai alat dalam mengatur perekonomian masyarakat. Karena pada masa itu pasar dianggap belum mampu berkembang, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk “campur tangan” didalam perekonomian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pandangan ini ditentang karena dianggap pemerintah (Negara) bukan lagi sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi lebih kepada badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

B. Kebijakan Fiskal Dan Moneter Sebagai Produk Politik

Sebagai produk politik, fiskal dan moneter tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga-lembaga pemerintah, kepentingan actor serta mekanisme pertanggung jawaban diantara lembaga-lembaga tersebut baik ditingkat pusat maupun di daerah, sehingga pemahaman mengenai interaksi politik diantara lembaga-lembaga tersebut sangat penting. Subtansial kebijakan fiskal dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, perumusan kebijakan itu melibatkan keputusan politik. Kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing, perlindungan pemerintah terhadap industri-industri strategis dalam negeri, serta kebijakan yang menyangkut neraca perdagangan internasional merupakan contoh betapa pertimbangan politik seringkali lebih dominan didalam perumusan kebijakan fiskal.

Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah pengelolaan anggaran, dimana eksekutif mengacukan rancangan suatu anggaran ke legislative(DPR),dalam DPR inilah suatu rancangan itu dibahas untuk disahkan. Berbagai kepentingan bertemu untuk saling bertransaksi. Kebanyakan kasus apabila sudah tercapai kesepakatan nilai-nilai antar actor yang tercermin dalam suatu pembahasan draft kebijakan, maka barulah suatu kebijakan tersebut terbentuk (Kumorotomo, 2004).

Tindakan pemerintah untuk membuat kebijakan dibatasi oleh corak dan kualitas partisipasi warga negara dalam proses pembuat keputusannya. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran program atau kebijakan yang dibuatnya, pemerintah harus

memperhatikan reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan dan program-program yang dilaksanakan.

C. Dimensi Politik Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan atas pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspek termasuk aspek hukum, aspek politik maupun aspek lainnya. Perubahan tingkat komposisi pengaturan pengeluaran dan penerimaan dapat berdampak pada variable-variable perekonomian yaitu agregat permintaan dan tingkat kegiatan ekonomi, pola aplikasi sumber daya, dan distribusi sumber daya. Kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya jika kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Dalam pembahasan RAPBN hingga menjadi APBN antara pemerintah dengan DPR merupakan pandangan para pengamat ekonomi, salah satu isu sentralnya adalah pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2022). Adapun argumentasi pemerintah, DPR dan pengamat ekonomi yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama kebijakan fiskal (dalam kerangka lebih luas kebijakan makro ekonomi), yaitu untuk memutuskan berbagi permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga prioritas kebijakan fiskal hanya terkonsentrasi pada peningkatan pertumbuhan.

D. Politik Kebijakan Moneter

Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan fiskal. Suatu kebijakan sendiri itu merupakan salah satu konsep dari ilmu politik. Mengenai kebijakan moneter dengan keterbatasan anggaran yang atas dasar kebijakan itu dibuat, misalnya adalah dalam hal mengeset standar bunga pinjaman atau dalam hal bantuan likuiditas. Tentu aspek-aspek politik tak terlepas dalam penentuan tersebut. Kebijakan moneter berperan dalam menstabilkan perekonomian, sector yang terlebih dahulu merasakan adalah sector perbankan yang kemudian di transfer ke sector riil yang baik secara langsung dan tidak langsung pasti terpengaruhi atau dipengaruhi oleh situasi politik yang ada.

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral guna mempengaruhi penawaran uang dan mengubah tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman.

Kebijakan moneter mengacu pada kebijaksanaan otorita moneter suatu negara yang menyangkut masalah-masalah moneter (Karianga, 2013) Kebijakan moneter dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan yang berkenaan dengan pengendalian lembaga keuangan, penjualan dan pembelian secara aktif kertas-kertas berharga oleh otorita moneter sebagai iktikar sengaja untuk mempengaruhi perubahan keadaan uang, pembelian dan penjualan secara pasif kertas berharga yang timbul dari usaha mempertahankan struktur suku bunga tertentu.

KESIMPULAN

Ekonomi berasal dari perkataan Yunani "Oikonomia". Secara etimologis kata "oikos" berarti "rumah" dan kata "nomos" berarti "peraturan". Dengan lapangannya terbatas pada soal-soal yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia dalam usaha mencapai kemakmuran jasmani (material wealth). Politik dalam bahasa Arabnya disebut "Siyasyah"

atau dalam bahasa Inggrisnya “Politics”. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Ekonomi dan politik adalah dua sistem yang tidak dapat disamakan. Keduanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pengertian dan fungsi, dan tujuannya masing-masing.

Pada dasarnya, ekonomi politik dijadikan Negara sebagai alat dalam mengatur perekonomian masyarakat. Karena pada masa itu pasar dianggap belum mampu berkembang, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk “campur tangan” didalam perekonomian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pandangan ini ditentang karena dianggap pemerintah (Negara) bukan lagi sebagai agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi lebih kepada badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

Hubungan politik dengan ekonomi di bagi dua. Pertama, kebijakan umum (public policy) atau politisme yang melihat politik menentukan ekonomi. Kedua, ekonomisme yang liberal maupun Marxis yang melihat ekonomi menentukan politik. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atas pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Subjek kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah dengan segala aspek termasuk aspek hukum, aspek politik maupun aspek lainnya.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor , dimana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Suatu kebijakan sendiri itu merupakan salah satu konsep dari ilmu politik.

Kebijakan moneter berperan dalam menstabilkan perekonomian, sector yang terlebih dahulu merasakan adalah sector perbankan yang kemudian di transfer ke sector riil yang baik secara langsung dan tidak langsung pasti terpengaruhi atau dipengaruhi oleh situasi politik yang ada. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral guna mempengaruhi penawaran uang dan mengubah tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., & Syafii, R. (2022). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 123-135.
- Basri, M. C., & Siregar, S. V. (2021). Kebijakan Moneter dan Fiskal: Hubungan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi Makro. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 22(1), 45-60.
- Hadi, M. H., & Ismail, M. (2020). Kebijakan Fiskal sebagai Instrumen Politik dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Politik dan Ekonomi*, 14(3), 78-92.
- Hendra Karianga, 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : Kencana Premendamedia Group.
- Kurniawan, I., & Wijaya, A. (2019). Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Konteks Politik Ekonomi di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 101-115.
- Lestari, S., & Sulaiman, N. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(4), 142-156.
- Medya, Ratri. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Pt Gelora Aksara Pratama
- Putong Iskandar, 2013. *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, A. S., & Dewi, P. (2021). Kebijakan Moneter sebagai Alat Politik: Studi Kasus Indonesia dan Negara Lain. *Jurnal Studi Politik dan Ekonomi*, 11(1), 56-70.
- Rahmat, A., & Harahap, E. (2020). Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 89-104.
- Santoso, B., & Hartono, Y. (2021). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Stabilitas Ekonomi: Perspektif Politik. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 18(3), 120-134.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2004. *Desentralisasi Fiskal Politik Dan Perubahan Kebijakan*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Wibowo, S., & Rizal, M. (2022). Interaksi Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 20(1), 67-82.
- Yuliana, R., & Nasution, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Penanganan Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 23(2), 112-128.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)